

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 merupakan babak awal bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka. Suatu hal yang tidak mengherankan apabila di negara-negara yang baru bebas dari kekuasaan kolonial mempunyai satu dorongan yang kuat untuk memperbesar peranan ekonomi bangsanya. Seperti yang diungkapkan oleh Sjahrir (1986: 73) langkah yang logis bagi suatu negara yang baru merdeka adalah meningkatkan taraf hidup rakyatnya dan merombak struktur ekonomi yang mencerminkan kemerdekaan politiknya. Selaras dengan usaha konsolidasi di bidang politik yang menitikberatkan pada unsur-unsur nasional, salah satu tujuan utama dari pemerintah Republik Indonesia di bidang ekonomi adalah mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.

Selama periode 1945-1949, Indonesia mewarisi struktur ekonomi pemerintahan kolonial. Suatu kenyataan yang harus dihadapi bangsa Indonesia, bahwa perekonomian negaranya masih dikuasai oleh orang-orang asing. Seperti yang dijelaskan oleh Mackie (Soesastro, 2005: 17) ekonomi kolonial di Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut.

Upah dan ongkos yang sangat rendah, efisiensi tinggi di sektor perkebunan dan juga investasi yang besar oleh perusahaan-perusahaan Belanda di sektor pertambangan dan jasa-jasa seperti perdagangan dan komunikasi, selain sistem mata uang yang stabil dan kemampuan yang besar untuk menyesuaikan

diri terhadap perubahan dalam kondisi ekonomi dunia. Tetapi ekonomi kolonial hanya menguntungkan pihak penjajah, Indonesia sebagai negara jajahan memberikan sumbangan sebesar 8% dari pendapatan nasional negeri Belanda.

Struktur perekonomian kolonial yang masih mapan sebagai warisan penjajahan, membuat perekonomian Indonesia sangat tergantung pada produksi pertanian dan perkebunan (Gunadi, 1985: 323). Sektor formal (modern), seperti pertambangan, distribusi, transpor, Bank dan pertanian komersil yang memiliki kontribusi lebih besar daripada sektor informal (tradisional) terhadap *output* nasional didominasi oleh perusahaan-perusahaan asing yang kebanyakan berorientasi ekspor komoditi primer. Pada umumnya kegiatan ekonomi tersebut, masih dikuasai oleh orang asing relatif lebih padat kapital dibandingkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang didominasi oleh pribumi (Tambunan, 1996: 18).

Keadaan tersebut merupakan warisan dari kolonial Belanda di Indonesia, pemerintah Belanda secara sengaja tidak membentuk golongan pengusaha yang tangguh dikalangan masyarakat pribumi. Dalam pandangan Belanda, apabila terbentuk golongan pengusaha pribumi yang tangguh berarti masyarakat pribumi memperoleh suatu kekuatan ekonomi. Hal tersebut merupakan suatu ancaman bagi kekuasaan pemerintah kolonial Belanda, dengan segala pengaruhnya Belanda mengarahkan minat sebagian masyarakat untuk terjun dalam birokrasi pemerintahan atau dengan kata lain menjadi pegawai negeri disamping menjadi petani, buruh, nelayan dan pedagang eceran.

Pengakuan kedaulatan Republik Indonesia tanggal 27 Desember 1949 oleh pemerintah Belanda menunjukkan bahwa, secara politis dan yuridis bangsa Indonesia telah merdeka, akan tetapi kemerdekaan politik negara Indonesia tersebut belum diikuti dengan kemerdekaan ekonominya. Pihak Belanda menetapkan persyaratan-persyaratan dalam perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) untuk keuntungan dan menjamin ekonomi Belanda. Adapun persyaratan-persyaratan ekonomi dari perjanjian KMB, seperti yang diungkapkan oleh Soesastro (2005: 18) diantaranya.

1. Menjamin bahwa perusahaan-perusahaan Belanda dapat meneruskan usaha mereka seperti biasa, termasuk pengiriman ke luar keuntungan mereka (*remittance of profits*).
2. Mengharuskan pemerintah Indonesia berkonsultasi dengan negeri Belanda mengenai tindakan moneter dan keuangan apapun yang bisa berdampak pada kepentingan Belanda.
3. Menetapkan bahwa nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda membutuhkan kesepakatan kedua belah pihak dan harus memperoleh kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan nilai sebenarnya.
4. Mengharuskan Indonesia mengambil alih utang pemerintah sebesar US\$ 1,1 milyar.

Hal di atas mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk segera melaksanakan pembangunan nasional yang lebih terencana dan intensif. Pembangunan nasional ini dititikberatkan pada usaha perbaikan dan perkembangan di bidang ekonomi. Dalam hal ini tidak berarti pembangunan dan perkembangan di

bidang politik, sosial dan kebudayaan terabaikan karena di antara keempat bidang tersebut dengan yang lainnya saling berkaitan.

Melalui salah satu kebijakan ekonominya yang kemudian dikenal dengan nama Program Benteng, pemerintah Republik Indonesia berusaha untuk mengubah struktur ekonomi yang ada dari sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Pada dasarnya kebijakan ini bertujuan untuk membentuk golongan pengusaha pribumi yang tangguh sebagai suatu kekuatan pendukung kebijaksanaan pemerintah. Tujuan lainnya, ialah untuk mengimbangi dan mengurangi kesenjangan antara kekuatan ekonomi pengusaha asing dan Cina dengan kekuatan pengusaha pribumi.

Sementara itu tujuan Program Benteng dijelaskan oleh Gunadi (1985: 330) program politik benteng bertujuan “Indonesianisasi” melalui pengelompokan-pengelompokan pedagang-pedagang Indonesia dalam “Kelompok Benteng” (benteng groep), dan berusaha mengurangi ketergantungan negara pada kekuatan-kekuatan ekonomi asing dengan cara memperkuat otot dan tulang punggung pengusaha-pengusaha pribumi melalui pembentukan-pembentukan dan pemupukan modal nasional agar mampu bersaing terhadap *‘The Big Five’*, yaitu perusahaan-perusahaan dagang milik Belanda, untuk akhirnya di Republik ini lahir golongan pedagang nasional yang mampu menangani pekerjaan-pekerjaan yang selama ini berada ditangan bangsa asing, yaitu sektor perdagangan. Selain itu tujuan ganda Program Benteng adalah mendorong tumbuhnya golongan pengusaha pribumi Indonesia yang

kuat sekaligus mengurangi kendali atas perdagangan impor oleh perusahaan-perusahaan dagang umum Belanda yang tergabung dalam *'Big Five'* (Thee, 2005).

Program Benteng difokuskan pada upaya mengamankan pengendalian nasional atas perdagangan impor. Upaya ini diusahakan melalui pengembangan golongan wiraswasta pribumi yang tangguh dan menempatkan satu sektor ekonomi yang penting, yaitu perdagangan impor di bawah kendali nasional. Dalam program ini lisensi impor berbagai jenis barang yang mudah dijual diberikan kepada importir pribumi Indonesia. Fokus Program Benteng dalam perdagangan impor didasarkan pada pertimbangan bahwa perdagangan impor paling mudah dikendalikan oleh negara melalui alokasi lisensi impor. Sektor perdagangan juga dianggap paling cocok untuk memajukan pengusaha pribumi, karena membutuhkan modal dan sumberdaya usaha yang relatif kecil. Lewat perdagangan impor ini para pengusaha pribumi Indonesia diharapkan dapat memupuk cukup modal untuk memasuki sektor-sektor lain Robinson (Thee, 2005). Diharapkan, dengan modal yang dapat dipupuk, pengusaha pribumi dapat melakukan diversifikasi ke bidang-bidang lain, seperti perkebunan besar, perdagangan dalam negeri, asuransi, dan industri substitusi impor sebagaimana sudah dirintis oleh beberapa pengusaha Anspach (Thee, 2004: 44). Tujuan Program Benteng diharapkan tercapai, apabila usaha ini berhasil, secara bertahap pengusaha pribumi akan berkembang maju dan tujuan mengubah struktur ekonomi kolonial akan tercapai.

Adapun kabinet-kabinet yang berkuasa pada masa demokrasi parlementer dan kebijakan ekonominya dalam Program Benteng, diantaranya.

1. Kabinet Natsir (September 1950 – April 1951)
2. Kabinet Sukiman (April 1951 – Februari 1952)
3. Kabinet Wilopo (April 1952 – Juni 1953)
4. Kabinet Ali I (Agustus 1953 – Juli 1955)
5. Kabinet Burharuddin Harahap (Agustus 1955 – 1956)
6. Kabinet Ali II (April 1956-Maret 1957)

Berdasarkan uraian singkat mengenai program ekonomi benteng dan kegagalan program ekonomi tersebut dalam mencapai tujuan, beserta pengaruh bagi perekonomian Indonesia, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang “Pengaruh Kebijakan Ekonomi Program Benteng Terhadap Pembentukan Pengusaha Pribumi Tahun 1950-1957”.

Pemilihan permasalahan Program Benteng karena penulis tertarik mengenai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah pada masa demokrasi Parlementer yaitu program ekonomi benteng. Penulis juga ingin mengkaji pengaruh kebijakan Program Benteng terhadap perekonomian Indonesia, dan apa yang menyebabkan Program Benteng gagal dalam mencapai tujuan. Kajian mengenai program ekonomi benteng belum pernah dilakukan di UPI, khusus di Jurusan Pendidikan Sejarah. Hal tersebut juga menjadi faktor pendorong untuk mengkaji permasalahan tersebut. Sedangkan kurun waktu yang dipilih yakni dari tahun 1950-1957. Tahun 1950 merupakan awal diberlakukannya Program Benteng, dan pada tahun 1957 merupakan akhir diberlakukannya Program Benteng.

I. 2 Perumusan dan Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memfokuskan masalah penelitian tentang "Bagaimana pengaruh kebijakan ekonomi Program Benteng terhadap pembentukan pengusaha pribumi selama kurun waktu 1950-1957?". Untuk lebih memfokuskan pada pokok pembahasan maka penulis merumuskan batasan-batasan masalah yang dimaksud menjadi beberapa pertanyaan sebagai berikut.

1. Mengapa muncul kebijakan ekonomi Program Benteng?
2. Bagaimana peran serta pemerintah Republik Indonesia dalam pelaksanaan Program Benteng?
3. Apa dampak dari pelaksanaan kebijakan ekonomi Program Benteng?

I. 3 Tujuan Penulisan

Sesuai dengan judul skripsi, maka penulisan skripsi ini memiliki beberapa tujuan.

1. Mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang pelaksanaan Program Benteng, yang di dalamnya akan terkait dengan kondisi sosial ekonomi sebelum adanya kebijakan ekonomi Program Benteng dan usaha-usaha dalam rangka perintisan menuju munculnya ide-ide program ekonomi benteng.
2. Menganalisis peran serta pemerintah Republik Indonesia dalam pelaksanaan Program Benteng sebagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah.
3. Menjelaskan dampak dari pelaksanaan kebijakan ekonomi Program Benteng.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi tulisan-tulisan atau pengetahuan tentang sejarah ekonomi pada umumnya.

Penggunaan pendekatan dalam suatu penelitian juga akan dapat mempermudah penelitian yang dilakukan karena suatu penelitian tidak terlepas dari keterkaitan interdisipliner, yakni pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial. Seperti yang diungkapkan oleh Kuntowijoyo (1995: 117) semua tulisan sejarah yang melibatkan suatu gejala sejarah dengan jangka yang relatif panjang (aspek diakronis) dan yang melibatkan penelitian aspek ekonomi, masyarakat, atau politik (aspek sinkronis) memiliki pendekatan ilmu-ilmu sosial. Dengan demikian skripsi ini dilakukan dengan meminjam konsep-konsep dari ilmu sosial yaitu ekonomi dan politik.

1.4 Penjelasan Judul

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai topik kajian, maka penulis merasa perlu untuk memberikan batasan pada judul skripsi “Pengaruh Kebijakan Ekonomi Program Benteng Terhadap Pembentukan Pengusaha Pribumi Tahun 1950-1957”. Penulis akan memberikan penjelasan terhadap beberapa istilah yang terdapat dalam judul tersebut.

- **Kebijakan Ekonomi**

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak

tentang pemerintahan, organisasi, dsb (KBBI, 2002: 149). Sementara ekonomi adalah ilmu yang menangani asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan seperti hal keuangan, perindustrian dan perdagangan, selain itu ekonomi diartikan sebagai tata kehidupan perekonomian suatu negara (KBBI, 2002: 287).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dijelaskan kebijakan ekonomi adalah suatu kebijakan pemerintah untuk mengatur dan mengawasi pertumbuhan dan aktivitas ekonomi di negaranya (KBBI, 2002: 149). Kebijakan ekonomi pada dasarnya merupakan suatu rencana pembangunan ekonomi. Agar kebijaksanaan itu dapat mencapai tujuan maka harus diikuti oleh kebijakan ekonomi lainnya yang saling mendukung (Suroso, 1995: 138).

Komaruddin dalam bukunya yang berjudul *Persoalan Pembangunan Ekonomi Indonesia* (1974), menyebutkan kebijakan ekonomi memiliki tujuan penting, yaitu.

- a. Perkembangan ekonomi, yaitu perkembangan yang selaras antara pertanian dan industri, antara tingkat produksi bahan makanan dan tingkat pertumbuhan penduduk dan suatu keselarasan yang relatif antara jumlah penduduk di berbagai pulau dengan kekayaannya masing-masing.
- b. Stabilisasi ekonomi, yaitu stabilisasi ekonomi yang kemantapannya dapat dipelihara adalah suatu wadah yang baik untuk ruang gerak dan ketenangan pembangunan.
- c. Keadilan ekonomi dan kemerdekaan.

- Program Benteng

Program adalah rancangan mengenai asas serta usaha dalam ketatanegaraan, perekonomian, dsb yang akan dijalankan (KBBI, 2002: 897). Sementara benteng adalah bangunan tempat berlindung atau bertahan dari serangan musuh, selain itu benteng diartikan sebagai sesuatu yang dipakai untuk memperkuat atau mempertahankan kedudukan (KBBI, 2002: 135).

Mengenai penjelasan Program Benteng yang dibahas dalam penelitian ini dapat dijelaskan kebijakan benteng adalah kebijakan yang muncul pada priode demokrasi parlementer, yaitu mendorong terciptanya lapisan pengusaha nasional, sejumlah fasilitas disediakan pemerintah agar pengusaha nasional dapat bangkit dan mampu menjadi mitra pemerintah dalam membangun ekonomi nasional (Leirissa,1966: 94).

Sementara dalam Sjahrir (1986: 74), tujuan Program Benteng adalah menciptakan pengusaha pribumi Indonesia dengan mengerluarkan perundang-undangan untuk menunjang kredit. Penjelasan lain menyatakan bahwa Program Benteng (benteng group) merupakan program pemerintah yang pada hakekatnya adalah kebijaksanaan untuk melindungi usaha-usaha pribumi (Poesponegoro, 1993: 240).

Program Benteng difokuskan pada upaya mengamankan pengendalian nasional atas perdagangan impor. Dalam program ini lisensi impor berbagai jenis barang yang mudah dijual diberikan kepada importir pribumi Indonesia (Thee, 2005). Fokus Program Benteng dalam perdagangan impor didasarkan pada pertimbangan

bahwa perdagangan impor paling mudah dikendalikan oleh negara melalui alokasi lisensi impor. Menurut Robinson (Thee, 2005) lewat perdagangan impor para pengusaha pribumi Indonesia diharapkan dapat memupuk cukup modal untuk memasuki sektor-sektor lain.

Berdasarkan penjelasan mengenai Program Benteng maka dapat disimpulkan bahwa Program Benteng merupakan kebijakan ekonomi yang pertama dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam upaya melindungi dan membantu perkembangan golongan pengusaha pribumi dan secara tidak langsung Program Benteng ditujukan untuk mengurangi kekuatan ekonomi pengusaha non pribumi.

- Pengusaha pribumi

Penjelasan mengenai pengusaha pribumi akan dijabarkan secara terpisah. pengusaha adalah orang yang mengusahakan (perdagangan, industri, dst), orang yang berusaha dalam bidang perdagangan; saudagar; usahawan (KBBI, 2002: 1254). Sementara menurut Amin (1953: 55), pengusaha adalah orang yang mempersatukan faktor produksi, modal dan tenaga kerja dalam suatu badan usaha (*onder neming*), yang dipimpinnya dengan tanggung jawab dan resiko sendiri. Sedangkan pengertian dari pribumi adalah penghuni asli; yang berasal dari tempat yang bersangkutan (KBBI, 2002: 895).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengusaha pribumi adalah orang yang melakukan usaha baik di bidang perdagangan, industri atau bidang lainnya di negaranya sendiri dimana mereka tinggal.

- Situasi kondisi Indonesia tahun 1950-1957

Tahun 1950-1957 Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer atau disebut juga demokrasi liberal, yang ditandai dengan munculnya sistem pemerintahan koalisi partai-partai politik. Pada masa ini kehidupan partai politik mendominasi kehidupan pemerintahan dan sistem pemerintahan, akibatnya antara partai politik bersaing atau berkoalisi untuk memperluas pengaruhnya dalam pemerintahan. Selama masa demokrasi liberal pemerintahan di Indonesia diwarnai dengan pergantian kabinet yang berulang kali, sehingga rata-rata tiap tahun terdapat pergantian kabinet (Poesponegoro dan Notosusanto, 1993: 212). Dengan sering terjadinya pergantian kabinet dan waktu yang pendek menyebabkan tidak adanya kabinet yang dapat melaksanakan program-programnya secara tuntas. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Tambunan (1996: 18) pada masa politik demokrasi liberal, umur demokrasi setiap kabinet rata-rata hanya sekitar dua tahun. Waktu yang sangat pendek ini disertai dengan banyak keributan di dalam kabinet tidak memberikan sedikitpun kesempatan atau waktu yang tenang bagi pemerintah yang berkuasa untuk memikirkan masalah sosial dan ekonomi yang ada pada saat itu.

Struktur perekonomian pada masa ini masih dipengaruhi oleh ekonomi kolonial, yaitu Indonesia mewarisi struktur ekonomi kolonial. Berbagai sektor ekonomi penting dikuasai oleh Belanda, hal ini disebabkan karena Konferensi Meja Bundar (KMB) menyatakan bahwa kepentingan bisnis Belanda dijamin di Indonesia. Sebagian besar sektor modern Indonesia (perkebunan, pertambangan, industri padat

modal, jasa modern seperti perbankan dan perdagangan besar serta jasa pelayanan publik seperti listrik, air, gas dikuasai oleh Belanda Higgins (Thee, 2004: 41).

Kegiatan-kegiatan yang terjadi dan bergolak dalam kehidupan politik kenegaraan selama masa demokrasi parlementer mempunyai dampak yang luas dalam kehidupan sosial budaya dan ekonomi. Situasi politik yang tidak stabil menjadi faktor utama yang menghalangi perkembangan pembangunan di bidang ekonomi, akibatnya upaya pembangunan menjadi terhambat dan terabaikan.

1.5. Metode dan Teknik Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode historis, yaitu metode yang lazim digunakan dalam penelitian sejarah. Metode historis adalah suatu proses untuk menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1986: 32). Metode historis adalah menguji dan mengarahkan secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Langkah-langkah tersebut terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penulisannya yaitu.

Pertama heuristik, yaitu pengumpulan sumber-sumber sejarah. Dalam hal ini penulis menghimpun dan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan keadaan Indonesia pada masa kebijakan ekonomi Program Benteng. Sumber yang banyak digunakan dalam mengkaji bahasan tersebut adalah sumber sekunder, yaitu sumber atau bahan bacaan yang sudah diolah berdasarkan hasil rekonstruksi pemikiran orang lain (Gottschalk, 1986: 35-40). Untuk sumber-sumber sekunder ini

penulis mendapatkan di perpustakaan umum ataupun koleksi pribadi. Selain itu juga penelusuran melalui internet untuk menggali informasi yang berkenaan dengan Indonesia pada masa demokrasi parlementer khususnya pada masa diberlakukannya kebijakan Program Benteng.

Kedua kritik eksternal dan internal, yaitu menilai sumber sejarah. Pada bagian ini seperti yang dinyatakan oleh Sjamsuddin (1996: 16) baik kritik eksternal maupun internal secara umum berfungsi untuk menguji originalitas dan keutuhan sumber sejarah, maka dalam hal ini pun penulis akan melakukan kritik eksternal untuk mencoba menguji otentitas serta integritas semua sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan. Adapun kritik internal dilakukan untuk melihat dan menguji dari dalam reliabilitas serta kredibilitas isi dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan tersebut ke dalam suatu pola tertentu.

Ketiga interpretasi, yakni menafsirkan sumber sejarah. Pada tahap ini penulis berusaha memberikan penafsiran terhadap sumber yang diperoleh dari sumber yang telah teruji melalui proses kritik eksternal dan internal.

Keempat historiografi, yakni penulisan sejarah. Tahap ini merupakan tahap akhir dari penelitian sejarah, pada tahap ini penulis akan menyajikan seluruh hasil temuannya dengan cara menyusun dalam bentuk tulisan yang jelas dengan gaya bahasa yang sederhana dan menggunakan tata bahasa penulisan yang baik dan benar.

Dalam mengumpulkan sumber-sumber yang diperlukan untuk bahan pengkajian penelitian ini penulis menggunakan teknik studi literatur. Studi literatur ini digunakan oleh penulis untuk menyimpulkan fakta-fakta dari berbagai sumber yang

relevan terhadap penelitian yang dikaji serta melakukan penelusuran (*browsing*) melalui internet untuk mencari sumber-sumber yang relevan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini tersusun sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan dan batasan masalah, tujuan penulisan, penjelasan judul, metode dan teknik penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIS

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai buku-buku dan berbagai literatur yang relevan dan berhubungan yang digunakan untuk membahas mengenai masalah yang dikaji.

BAB III METODE PENULISAN DAN TEKNIK PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas langkah-langkah, metode dan teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dalam mencari sumber-sumber yang relevan dengan penelitian, cara pengolahan sumber yang sudah didapat serta analisis terhadap sumber yang sudah diolah dan cara menuangkannya dalam bentuk tulisan.

BAB IV KEBIJAKAN EKONOMI PROGRAM BENTENG TAHUN 1950-1957

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan analisis berdasarkan metode yang digunakan.

BAB V KESIMPULAN

Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang merupakan hasil analisis penulis terhadap masalah-masalah secara keseluruhan setelah pengkajian pada bab sebelumnya.

